

Analisis Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Septriani Septriani

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, septriani@unib.ac.id,
Universitas Bengkulu

(Submit : 30 November 2023, Revised : 01 Desember 2023, Accepted : 30 Desember 2023)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi fenomena flypaper effect terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan laporan pendukung lainnya. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah 33 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian 2018-2022. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil regresi data panel diperoleh hasil yang secara parsial masing-masing variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat belanja daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia. Begitupun secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan besaran Adjusted R-squared adalah sebesar 97,07 persen. Sementara jika dilihat dari masing-masing koefisien variabel DAU dan PAD terhadap belanja daerah dapat disimpulkan bahwa terjadi flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Provinsi di Indonesia masih belum mandiri dalam memenuhi belanja daerahnya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, maka sebaiknya masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dijadikan sebagai sumber utama belanja daerah, kemudian pemerintah daerah juga harus memprioritaskan penggunaan belanja daerah untuk hal-hal yang produktif, sehingga adanya dana transfer pemerintah pusat mampu meningkatkan kemandirian kinerja keuangan pemerintah dan pada akhirnya bisa meminimalisir ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Kata kunci: Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Abstract

This study aims to detect the flypaper effect phenomenon on the financial performance of provincial governments in Indonesia. The data used in this study are secondary data sourced from the Directorate General of Financial Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and other supporting reports. The object of research is 33 provinces in Indonesia with a research period of 2018-2022. This study was analyzed using panel data regression analysis. Based on the results of regression panel data, partial results were obtained for each variable Local Own Source Revenue (OSR), General Allocation Fund (GAF) had a significant positive effect on the level of regional expenditure of the Provincial Government in Indonesia. And also, simultaneously Local Own Source Revenue (OSR), the General Allocation Fund (GAF) has a significant positive impact on regional expenditure of the Provincial Government in Indonesia with an Adjusted R-squared amount of 97.07 percent. Meanwhile, when viewed from each General Allocation Fund (GAF) and Local Own Source Revenue (OSR) variable coefficient on regional expenditure, it can be concluded that there is a flypaper effect on the financial performance of provincial governments in Indonesia. This shows that the level of independence of the provincial government in Indonesia is still not independent in meeting its regional expenditure. Therefore, based on the results of this study, each provincial government in Indonesia should increase Local Own Source Revenue (OSR) to be used as the main source of regional expenditure, then local governments should also prioritize the use of regional expenditure for productive things, so that the existence of central government transfer funds can increase the independence of government financial performance and ultimately can minimize dependence on the central government.

Keywords: Flypaper Effect, General Allocation Fund (GAF), Local Own Source Revenue (OSR)

LATAR BELAKANG

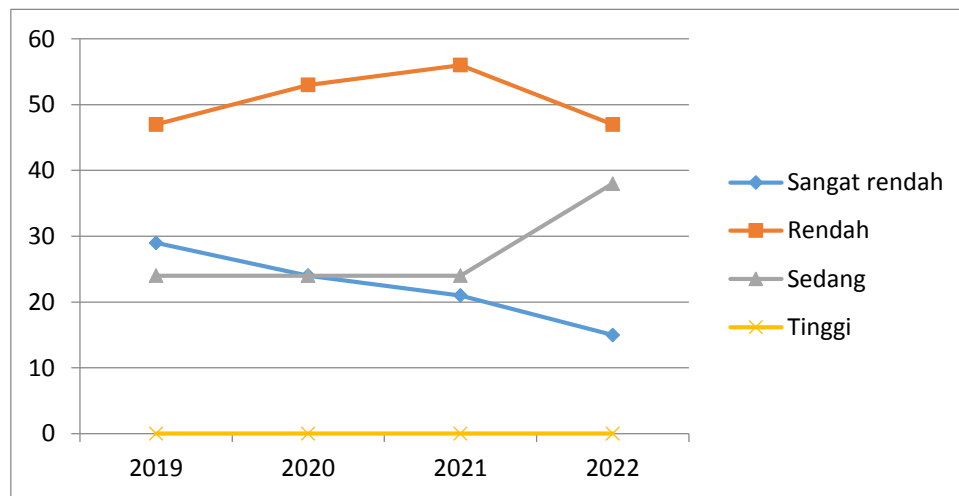
Adanya perbedaan potensi pada masing-masing daerah telah mengakibatkan adanya perbedaan tingkat kemajuan perekonomian pada masing-masing daerah tersebut. Pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dapat dilakukan melalui kebijakan desentralisasi fiskal (Elmi,2002). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan

kepada pemerintah daerah (UU No.32/2004). Tetapi, yang terjadi justru dana perimbangan dari pemerintah pusat ini seringkali dijadikan sebagai sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Hadi, 2011). Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan fiscal dalam pemanfaatan dana transfer pusat. Oleh karena itu, untuk melihat indikasi adanya tidak efisien pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori flypaper effect. Menurut Oates dalam Kuncoro (2007) respon pemerintah ini merupakan suatu tanggapan langsung dari pemerintah daerah dalam menyikapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diwujudkan pada anggaran belanja daerah. Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan flypaper effect.

Menurut Sidik (2002), otonomi daerah ini dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Adapun salah satu fenomena yang paling mencolok dari otonomi daerah di Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini sangat terlihat jelas dari aspek keuangan. Pemberian kewenangan ini memberikan dampak terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut. Terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah (Holtz–eaken et.al,1985). Menurut Prakosa (2004), tingkat pendapatan akan memiliki pengaruh positif pada pengeluaran public. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaan pemerintah daerah.

Menurut Otaes (1999), tujuan utama pemberian dana transfer adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Saragih (2003), kebijakan desentralisasi fiscal, bertujuan agar pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta dapat mendukung dan

meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi (Saragih, 2003). Akan tetapi, dalam perkembangannya tingkat kemandirian daerah justru tidak mengalami perbaikan, bahkan cenderung mengalami penurunan (Adi, 2007). Menurut Wibowo (2007), Pemda semakin menggantungkan diri pada Dana Alokasi Umum (DAU) daripada mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun klasifikasi persentase pemerintah provinsi Berdasarkan kemandirian keuangan dapat dilihat pada grafik 1.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2023)

Grafik 1. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian Tahun 2019-2022 (persen)

Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat besarnya distribusi provinsi di Indonesia menurut tingkat kemandirian selama periode 2019-2022. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia masih berada pada kategori tingkat kemandirian rendah. Adapun provinsi yang masuk kategori kemandirian rendah sebanyak 51 persen, kemudian yang masuk kategori kemandirian sangat rendah sebanyak 22 persen, kategori kemandirian sedang sebanyak 28 persen dan belum ada satupun provinsi yang masuk kategori kemandirian tinggi. Selain itu, grafik 1 ini juga menunjukkan adanya tren positif pada tingkat kemandirian provinsi di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah provinsi yang masuk dalam kategori tingkat kemandirian rendah

sekali semakin menurun. Badan Pusat Statistik (2022), kemandirian keuangan daerah penting terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Daerah dengan kemandirian yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk melakukan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi dari transfer dana pusat. Daerah juga bisa lebih leluasa dalam melakukan pengembangan jika memiliki kemandirian yang tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan analisis mengenai fenomena kemungkinan terjadinya Flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu belanja daerah dan dua variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel yang terdiri dari data time series (2018-2022) dan cross section. Kemudian, data penelitian ini dikumpulkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan laporan pendukung lainnya. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Adapun model atau persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

BD adalah Belanja Daerah

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah

DAU adalah Dana Alokasi Umum

β_0 adalah Konstanta

β_1, β_2 adalah koefisien regresi variabel independen

i adalah cross section (Provinsi di Indonesia)

t adalah periode waktu

ε adalah Error term.

Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect, dibandingkan koefisien standar beta dan nilai t-statistik untuk masing-masing variabel. Ghozali (2005), menyarankan bahwa koefisien standar beta digunakan untuk melihat pentingnya masing-masing variabel independen secara relatif. Menurut Supranto (2001), begitu juga untuk melakukan pengujian keberartian tiap-tiap koefisien β_1, β_2 dapat dilihat pada nilai t statistik. Selanjutnya, menurut Ghozali (2005), uji statistik t ini, untuk melihat besarnya masing-masing variabel independen mampu menerangkan variabel dependen secara individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Widarjono (2009), dalam metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain common effect model, fixed effect model dan random effect model. Dalam menentukan model terbaik, maka dilakukan beberapa pengujian yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier. Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier diperoleh Model Random Effect sebagai model terbaik. Adapun hasil regresi model terbaik dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Model Terbaik (Random Effect Model)

<i>Var.</i>	<i>Coeffi.</i>	<i>Std. Err.</i>	<i>t-Statist.</i>	<i>Prob.</i>
<i>C</i>	1447.743	843.6259	1.716096	0.0881
PAD	1.421945	0.065561	21.68874	0.0000
DAU	1.740974	0.079058	22.02150	0.0000

R²: 0.9710

Adjusted R-Square : 0.9707

F-statistic : 2686.078

Prob (F-Statistic) : 0.000000

Sumber : Data Sekunder (diolah, 2023)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut;

$$BD_{it} = 41447.743 + 1.421945 PAD + 1.740974 DAU$$

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.421945 dan t-statistik bernilai positif dengan probabilitas t-statistik PAD (0.0001) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Indonesia. Artinya, ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 1 milyar, maka belanja daerah di Indonesia juga akan meningkat sebesar Rp1.421.945.000, sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang 1 milyar, maka belanja daerah di Indonesia juga akan turun sebesar Rp1.421.945.000.

Adanya Pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa masing-masing belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Provinsi Tersebut. Menurut Septriani (2020), semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah. Artinya semakin tinggi juga kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kemampuan dalam merealisasi pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta semakin besar pengalokasian anggaran belanja daerah untuk tahun selanjutnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia diketahui bahwa selama periode 2018-2022, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi di Indonesia senantiasa berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,3 persen per tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini berasal dari beberapa komponen, diantaranya Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Selama

periode 2018-2022, adapun yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh Provinsi di Indonesia yaitu bersumber dari pendapatan Pajak Daerah. Pajak Daerah rata-rata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 70 persen, sementara retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), masing-masing sebesar 3 persen, sedangkan lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi sebesar 24 persen. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas perekonomian dalam masyarakat, terutama tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah ini telah berdampak pada peningkatan belanja daerah. Seperti yang dinyatakan oleh Maimunah dan Akbar (2008), bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *taxpend hypothesis* atau pengeluaran pemerintah akan disesuaikan dengan pendapatan pemerintah. Musgrave (1984), menyatakan bahwa pada negara maju, di abad ke-19, pengeluaran pemerintah senantiasa meningkat dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan pendapatan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam pembelian barang dan jasa dan adanya perubahan ruang lingkup dan jangkauan transfer yang dilakukan oleh pemerintah.

Hasil ini senada dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Dahliah (2022), Septriani (2023), Mbuinga, et.al (2022), Mali, et.al (2021), Sofiyani dan Subadriyah (2020), Bitamala (2018), Setiyawan (2018), Ferdiansyah et.al (2018), Mangunkusumo (2012), Ashworth et al. (2005), Prakosa (2004), Sidik, et.al (2002), yang juga menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Sementara itu, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah, jika dilihat berdasarkan hasil regresi data panel, diperoleh koefisien variabel Dana

Alokasi Umum (DAU) sebesar 1.740974 dan t-statistik bernilai positif dengan probabilitas t-statistik (0.0131) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Indonesia. Artinya, ketika Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar 1 milyar rupiah, maka belanja daerah di Indonesia juga akan meningkat sebesar Rp1.740.974.000, begitu pun sebaliknya, jika Dana Alokasi Umum (DAU) turun sebesar 1 milyar rupiah, maka belanja daerah di Indonesia juga akan turun sebesar Rp1.740.974.000. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Republik Indonesia, besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah senantiasa berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2020-2022 dengan rata-rata penurunan sebesar 2,9 persen per tahun. Penurunan alokasi dana umum disebabkan karena adanya pandemic Covid-19. Pada Tahun 2020, pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan. Kemudian, pemerintah memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan negara, pemerintah menetapkan perubahan atas Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Tahun 2021-2022, rendahnya Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai akibat dari pandemic covid 19. Selama periode 2018-2022, rata-rata peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp11.820 milyar per tahun.

Menurut Maimuna dan Akbar (2008), pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah. Menurut Halim (2008), semakin besar dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah maka semakin besar belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ariyanti, et.al (2023), Septriani (2023), Rohmah dan Rahardjo (2023), Dahliah (2022), Fernandes dan Fauzia (2022),

Astutiawaty, et.al (2022), Mbuinga, et.al (2022), Iqbal, et.al (2021), Mangunkusumo (2012), Mali, et.al (2021), Simanjuntak dan Ginting (2019), Bitamala (2018), dan Sidik, et.al (2002) juga menemukan hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Selanjutnya, untuk mengetahui fenomena flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia adalah dengan membandingkan nilai koefisien standar beta dan nilai t-statistik untuk masing-masing variabel. Melo (2002) menyatakan bahwa flypaper effect terjadi apabila pengaruh (nilai koefisien) Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh (nilai koefisien) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah, dan nilai keduanya signifikan. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.421945, dan koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1.740974. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar dari koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan, pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Indonesia terjadi fenomena flypaper effect. Hal ini disebabkan karena stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (unconditional grants) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mayoritas belanja daerah pemerintah Provinsi di Indonesia masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Padahal dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian perekonomian masing-masing pemerintah daerah. Akan tetapi yang terjadi saat ini justru pemerintah daerah belum cukup mampu untuk meningkatkan kemandirian atau menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Selama periode 2018-2022, besarnya pendapatan daerah Provinsi di Indonesia rata-rata

bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Adapun belanja daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25 persen, bersumber dari dana transfer pemerintah pusat sebesar 67 persen dan sumber pendapatan lainnya sebesar 8 persen. Masih rendahnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah ini, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Provinsi di Indonesia masih sangat rendah. Selain itu, rendahnya kemandirian keuangan pemerintah provinsi ini dipengaruhi juga oleh jenis belanja daerah yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Jika dilihat berdasarkan jenis belanja daerah, maka mayoritas belanja yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah adalah belanja pegawai.

Dalam hal ini, diperlukan adanya upaya yang maksimal guna peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pemerintahannya. Menurut Mamuka dan Elim, (2014), dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Selama periode 2018-2022, rata-rata belanja daerah yang dikeluarkan untuk belanja pegawai sebesar 33 persen, belanja barang jasa sebesar 26 persen, belanja modal sebesar 16 persen dan belanja lainnya sebesar 24 persen. Jika anggaran yang dimiliki oleh pemerintah digunakan untuk hal-hal produktif, maka akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah tersebut, sebaliknya jika anggaran tidak digunakan dengan bijak, maka belanja tersebut tidak akan membawa perbaikan bagi perekonomian daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam pengelolaan anggaran yang mereka miliki. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahliah (2022), menyatakan bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak diatur oleh pemerintah pusat, dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sebuah dana yang kendali penggunaannya benar-benar berada di tangan pemerintah daerah, umumnya penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah daerah didasarkan atas prioritas dan kebutuhan daerah dengan maksud

untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan belanja daerah diharapkan memprioritaskan aspek pelayanan publik, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan (peningkatan pertumbuhan ekonomi) dan pada gilirannya terjadi peningkatan kontribusi pajak maupun retribusi dari masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fintari (2020), bahwa terjadi flypaper effect di Kota Bima, yang dilihat dari besaran koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Paramita (2016), yang menemukan bahwa pada kabupaten.kota di Pulau Nusa Tenggara, Pulau Papua dan Maluku terjadi flypaper effect pada belanja daerahnya. Lebih lanjut Pratiwi dan Paramita (2016) mengatakan bahwa untuk mengatasi fenomena flypaper effect tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi daerah selain yang bersumber dari pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan investasi dengan membuat badan usaha milik daerah (BUMD) pada sektor usaha produktif, dan menggunakan belanja daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil regresi data panel, diperoleh hasil bahwa secara parsial masing-masing variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat regional expenditure di Indonesia. Begitupun secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Indonesia dengan besaran Adjusted R-squared adalah sebesar 97,07 persen. Kemudian, jika dilihat Berdasarkan fenomena flypaper effect, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil

penelitian ini, maka sebaiknya masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dijadikan sebagai sumber utama belanja daerah, kemudian pemerintah daerah juga harus memprioritaskan penggunaan belanja daerah untuk hal-hal yang produktif, sehingga dengan adanya dana transfer pemerintah pusat mampu meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah dan pada akhirnya bisa meminimalisir ketergantungan dengan pemerintah pusat. Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah, penelitian ini hanya berfokus pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber dana dari pusat.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. (2007). Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi.” The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ariyanti, D., Masnila, N., & Choiruddin. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi di Pulau Sumatera. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6 (6), 2174-2189.
- Astutiawaty, L., Lukita, C., & Astriani, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 242–262.
- Ashworth, J., Geys, B. & Heyndels, B. (2005). Government Weakness and Local Public Debt Development in Flemish Municipalities. *International Tax and Public Finance*, 12, 395-422.
- Bitamala, I. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *JESYA (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2750-2761.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Elmi, Bachrul. (2002). Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta : UI Press.

- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D.R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*, 14(1), 44-52.
- Fernandes, J., & Fauzia, L. (2022a). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2017-2020. *Jurnal Revenue Akuntansi*, 3(1), 187-197.
- Fintari, S. (2020). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barata (NTB). *Jiapi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintah Indonesia*, 1(1), 59-68.
- Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Holtz-Eakin, Whitney Newey, & Harvey Rosen. 1985. Implementing causality test with panel data, with an example from local public finance. NBER Technical Working Paper No. 48.
- Iskandar, Irham. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 13(1), 113-131.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 1-13.
- Maimunah, M., & Akbar, R. (2008). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/Kota di pulau Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, II (1), 37-51.
- Mamuka, Veronika dan Elim, Inggriani. (2014). Analisis Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*. 2(1), 464-655.
- Mali, M.P.S., Sodik., Tahir, M.A. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017-2019. *The 2 nd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021)*.
- Mangunkusumo, S. C. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD). Skripsi. Universitas Gunadarma Jakarta.

- Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203-3213.
- Melo, Ligia. (2002). The Flypaper Effect Under Different Institutional Context: The Columbian Case. *Public Choice*. 111(3-4), 317-345.
- Musgrave. (1984). *The Theory Of Public Finance*. New York: Mc Graw Hill.
- Oates, Wallace E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Prakosa, K.B.. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiric di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8(2).
- Pratiwi, D.R., & Paramita, R. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia. *Jurnal Budget*, 208-224.
- Rohmah, F.N., & Rahardjo, S.N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020), *Diponegoro Journal of Accounting*, 12 (3), 1-11.
- Saragih, P.J. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Septriani, S., Armelly, A., Ekaputri, R. A., & Pasaribu, E. (2020). Analisis Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Kota Bengkulu. *Akuntabilitas*, 14(1), 33-56.
- Septriani, S. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(3), 884-894.
- Septriani, S., Hadiyanto, H., & Ekaputri, R. A. (2023). THE DETERMINANT FACTORS OF REGIONAL EXPENDITURE. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 63-83..
- Septriani, S. (2023). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1).
- Setiyawan, Y. P. (2018). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja daerah Di Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016 (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Sidik, M., B. Raksaka, M., Robert, S., & Bambang, B. (2002). Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Kompas.

Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Manajemen, 5(2).

Sofiyani, L., & Subadriyah. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus (DAK) Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Rokognisi Akuntansi, 4(1), 33-47.

Widarjono, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia.

Undang Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah..